

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dapat dipastikan melalui perencanaan pembangunan yang baik. Agar segala sesuatunya dapat terlaksana dengan baik, perencanaan harus diubah sesuai dengan tujuannya. Demi perencanaan pembangunan yang efektif, prinsip perencanaan yang baik tidak dapat dipisahkan, sedangkan prinsip perencanaan yang baik adalah melihat situasi saat ini, kegagalan masa lalu, potensi, tantangan dan hambatan yang ada dan ancaman menjadi peluang, dengan partisipasi dan koordinasi pemangku kepentingan, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, demokrasi, transparansi, realisme, legitimasi, dan praktik (Reni, 2021).

Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan program pembangunan di semua bidang dan memfasilitasi hubungan antar banyak individu untuk pembangunan kolaboratif merupakan secercah harapan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik saat ini maupun di masa depan (Sandiasa & Agustana, 2017). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa seluruh SKPD di Kabupaten Purwakarta termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kini wajib menggunakan aplikasi SIPD-RI dibandingkan aplikasi SIMDA. Perubahan ini dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Baik sebagai alat perencanaan maupun pengelolaan, anggaran memiliki dua tujuan. Kegiatan pemerintahan dibiayai sebagian oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan anggaran dalam mengatur pelaksanaan operasional pemerintah dapat dinilai dengan menggunakan data akun pengeluaran yang terdapat pada anggaran atau lembaga pemerintah (Nasution & Nurwani, 2021).

Teknologi di industri keuangan, khususnya SIPD-RI, mengalami kemajuan pesat dan pemerintah memanfaatkan teknologi ini untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab dan transparan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap penerapan aplikasi web ini akan mempercepat proses pemantauan dan evaluasi pelayanan publik, namun mewujudkan program SIPD-RI bukanlah suatu hal yang mudah dan memerlukan upaya gabungan dari seluruh instansi terkait.

Untuk memudahkan pencapaian akuntabilitas yang diantisipasi, maka diluncurkanlah perangkat lunak teknologi SIPD-RI. Program ini dapat digunakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan pada tingkat akuntansi dan pelaporan. Peraturan pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang pembentukan sistem informasi akuntansi. Meski mudah digunakan, program ini dapat mendukung setiap langkah pengelolaan keuangan daerah, baik penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Untuk memperlancar tahapan penyusunan rencana daerah yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan, Kementerian Dalam Negeri membentuk SIPD-RI. Hal tersebut menyinggung persyaratan peraturan perundang-undangan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan penerapan perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam upaya penyempurnaan SIPD-RI. Pada tahun 2020, Pemkab Purwakarta mulai menyalurkan SIPD-RI yang sebelumnya menggunakan SIMDA. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyempurnakan birokrasinya yang semakin kompleks dengan penerapan SIPD-RI. Sistem informasi SIPD-RI diharapkan dapat mencakup perencanaan keuangan dan pembangunan pemerintahan daerah. Selain pengumpulan data, SIPD-RI juga memanfaatkan teknologi informasi real-time untuk membantu perencanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan logis. Selain itu, sistem ini dapat digunakan untuk memfasilitasi integrasi pelaporan keuangan dan data pembangunan di seluruh lembaga pemerintah.

Prosedur perencanaan, penganggaran, dan program kegiatan sangat

bergantung pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta akan lebih mudah beradaptasi, efisien, dan efektif dengan digunakannya sistem aplikasi dalam pengorganisasian kegiatan, anggaran, dan perencanaan.

Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memerlukan pertimbangan yang matang terhadap permasalahan komunikasi baik teknis maupun non komunikasi. Fitur-fitur ini merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan saat merancang aplikasi SIPD. Data dalam semua komunikasi berfungsi sebagai tolak ukur perbaikan SIPD atau sistem informasi pemerintahan daerah. Di sini, infrastruktur jaringan memainkan peranan penting sebagai landasan jaringan komunikasi yang terbentang dari periferi hingga ke pemerintah federal. Data dan informasi dalam manajemen mungkin lebih mudah dibagikan dan dipusatkan melalui jaringan komunikasi, yang pada gilirannya membantu mempengaruhi pengambilan keputusan. Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat disebarluaskan lebih luas melalui jaringan komunikasi.

Dalam hal perencanaan dan pengalokasian dana untuk program, teknologi informasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengolahan data dan sistem informasi. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah contoh sempurna dari sistem informasi yang cepat, akurat, lengkap, dan transparan yang diperlukan untuk pengolahan data yang efisien dan sukses.

Kemendagri dalam menunjang pelaksanaan laporan keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat membantu dan meringankan proses perencanaan penganggaran dan program kegiatan yang berguna untuk memudahkan dalam penyusunan program kegiatan dan penyusunan anggaran. Karena tidak ada pelatihan formal mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada saat pertama kali diterapkan, siswa yang menggunakan sistem tersebut harus menghubungi Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan bimbingan. Hal ini memungkinkan pelaksana sistem untuk mengatasi kesulitan awal.

Oleh sebab itu, judul dalam penelitian ditetapkan, **“Implementasi Program**

## **Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian awal, terdapat beberapa masalah yang terjadi, maka penulis mengidentifikasi dan memfokuskan penelitian dalam mengimplementasikan program dan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis dalam penerapan Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Perangkat Daerah.
2. Kurangnya sumber daya manusia untuk meningkatkan atau menguasai Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Perangkat Daerah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana disposisi dalam implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana struktur birokrasi implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun untuk menjelaskan tentang Implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi dalam implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sumber daya dalam implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan disposisi dalam implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan struktur birokrasi dalam implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis, tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis

Program yang disebutkan dalam penelitian yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi kepada instansi pemerintah, khususnya yang menangani peralatan penelitian regional, akan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai batu loncatan untuk memecahkan masalah secara kreatif.

## 3. Manfaat Secara Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi kemajuan ilmu administrasi publik dan menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual ialah sebuah rangka baik bersifat teoritis ataupun eksperimental, yang menjadi acuan secara bersamaan berdasarkan pada penelitian (Anggara & Abdillah, 2019). Kerangka berpikir disusun berdasarkan pada teori yang dideskripsikan dan landasan teoritik berasal dari uraian yang ada dalam kerangka pemikiran (Pasolong, 2020).

Untuk dapat memahami dan mengetahui tujuan penelitian dari Implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, diperlukan kerangka pemikiran yang disusun dengan jelas.

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang bersangkutan dengan implementasi. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pembahasan terkait Implementasi Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro dan Nigro (1980) mengatakan bahwa administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan negara dan arena itu merupakan bagian dari proses politik (*public administration has an important role in the formulation of public policy and is this part of the political process*) (Anggara, 2012).

Teknologi informasi dan tindakan orang-orang yang menggunakannya untuk memfasilitasi manajemen dan operasi membentuk apa yang dikenal sebagai sistem informasi (SI). Ketika membahas interaksi antara manusia, proses algoritmik, data, dan informasi, kata “sistem” sering digunakan dalam arti yang sangat umum.

Menurut Laswell dan Kaplan yang dikutip oleh Mahendra et.al. (2018), kebijakan publik paling baik diwujudkan dalam bentuk program dengan tujuan, prinsip, dan prosedur yang jelas. Kebijakan seringkali mencakup beberapa program, dan program pada gilirannya mencakup banyak proyek; inilah sifat hubungan antara ketiganya. Namun kebijakan juga dapat diterapkan dengan cara yang lebih praktis, sebagai sebuah proyek. Salah satu cara kebijakan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah melalui pembentukan berbagai program dan sub-program.

Eksekusi ideal suatu kebijakan memungkinkannya mencapai tujuannya sendiri, menurut Edward dalam Karla (2021), terdapat empat faktor secara spesifik mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk mencegah distorsi implementasi, pelaksana harus menyadari apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mengkomunikasikan maksud dan tujuan kebijakan kepada khalayak yang dituju.
2. Sumber Daya: Jika orang yang bertugas melaksanakan kebijakan tidak mempunyai sumber daya yang diperlukan, maka komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten tidak akan berhasil. Sumber daya manusia, seperti pelaksana yang kompeten, dan sumber daya keuangan adalah dua contoh sumber daya semacam ini.
3. Disposisi atau watak pelaksana meliputi watak dan wataknya, termasuk ketakwaannya, kejujurannya, dan sifat demokratisnya. Dengan asumsi pembuat kebijakan menginginkan perilaku positif dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara efektif. Alasan lain mengapa kebijakan gagal terwujud adalah ketika mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang pembuat kebijakan.
4. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Disintegrasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan ciri-ciri struktur organisasi. Aktivitas organisasi menjadi kaku ketika terdapat kerangka yang terlalu panjang sehingga menumbuhkan pengawasan dan birokrasi, yaitu melalui berkembangnya proses birokrasi yang berbelit-belit dan canggung.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

